

## FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TATA NEGARA

Ahmad Rusly Purba <sup>1)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia <sup>1)</sup>

Corresponding Author:

[ahmad.rusly@fh.uisu.ac.id](mailto:ahmad.rusly@fh.uisu.ac.id) <sup>1)</sup>

### Abstrak

Fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penegakan hukum di Indonesia sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga yang bertugas menjaga kedaulatan konstitusi, MK memiliki beberapa fungsi utama, yaitu pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa pemilu, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Melalui pengujian undang-undang, MK memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan oleh legislatif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penyelesaian sengketa pemilu oleh MK berkontribusi pada legitimasi proses demokrasi dengan memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat. Selain itu, MK juga berperan dalam melindungi hak-hak konstitusional individu, memberikan putusan yang memulihkan hak-hak yang dilanggar, serta meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Dengan demikian, MK tidak hanya berfungsi sebagai pengawas terhadap tindakan lembaga negara, tetapi juga sebagai pendorong pengembangan hukum dan praktik demokrasi yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran dan dampak Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang pentingnya MK dalam sistem hukum dan tata negara di Indonesia.

**Kata Kunci:** Peran, Mahkamah Konstitusi, Demokrasi

### Abstract

*The role of the Constitutional Court (MK) in law enforcement in Indonesia is very important and strategic. As an institution tasked with maintaining constitutional sovereignty, the Constitutional Court has several main functions, namely judicial review of laws, resolution of electoral disputes, and protection of citizens' constitutional rights. Through judicial review, the Constitutional Court ensures that every regulation produced by the legislature does not contradict the principles contained in the 1945 Constitution. The Court's resolution of electoral disputes contributes to the legitimacy of the democratic process by ensuring that election results reflect the will of the people. In addition, the Constitutional Court also plays a role in protecting the constitutional rights of individuals, providing decisions that restore violated rights, and increasing legal awareness in society. Thus, the Constitutional Court not only functions as a watchdog over the actions of state institutions, but also as a driver of legal development and better democratic practices. This study aims to examine in depth the role and impact of the Constitutional Court in law enforcement in Indonesia, as well as the challenges faced in carrying out its duties. Hopefully, the results of this study can provide better insight into the importance of the Constitutional Court in the legal and constitutional system in Indonesia.*

**Keywords:** Role, Constitutional Court, Democracy

## PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai peranan penting dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan menguji undang-undang inkonstitusional, MK berada pada garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan konstitusi. Dalam konteks Indonesia, di mana dinamika politik dan hukum seringkali berfluktuasi, keberadaan MK menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Peran MK tidak hanya terbatas pada pengujian undang-undang, tetapi juga mencakup penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, MK menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan hukum dan demokrasi di Indonesia.

### History:

Received : 25 April 2024

Revised : 29 Mei 2024

Accepted : 23 November 2024

Published : 30 Desember 2024

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

**Attribution-NonCommercial-No**

**Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)**



Namun, tantangan yang dihadapi oleh MK juga tidak sedikit, mulai dari tekanan politik hingga isu independensi lembaga. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjamin konstitusi dan hak-hak asasi manusia. Melalui putusan yang dihasilkan, MK tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan tata negara. Penegakan hukum tata negara yang efektif sangat bergantung pada kemandirian dan integritas MK dalam menjalankan fungsinya.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan yang berwenang menguji undang-undang inkonstitusional, menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, dan melindungi hak konstitusional masyarakat. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi Indonesia dan penegak prinsip-prinsip demokrasi serta bertugas memastikan bahwa segala kebijakan dan tindakan pemerintah mematuhi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). (Anon 2003)

Menurut Jimry Asidikye, Gagasan pembentukan mahkamah konstitusi suatu negara pada umumnya muncul dari pengalaman suatu negara yang sedang mengalami krisis konstitusi dan baru saja meninggalkan sistem pemerintahan yang otoriter. Pendapat lain dari Bapak Hamdan Zoerba, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor , menyatakan bahwa berdirinya Mahkamah Konstitusi Nomor sejalan dengan seruan untuk membangun dan memperkuat supremasi hukum. Bagi Mahkamah Konstitusi, Konstitusi merupakan garda depan yang mencegah terjadinya korupsi legislasi. (Anon 2003)

#### **A. Dasar Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan

1. UU Dasar 1945: Pasal 24B UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang berfungsi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa hasil pemilu, dan menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara.
2. UU No. 24 Tahun 2003: UU ini mengatur tentang Mahkamah Konstitusi dan menetapkan struktur, fungsi, dan kewenangan MK. UU ini menjadi dasar operasional bagi MK dalam menjalankan tugasnya.
3. Perubahan UUD 1945: Setelah amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002, posisi dan peran MK semakin diperkuat, menjadikannya sebagai lembaga independen yang diharapkan mampu menjaga konstitusi dan hukum tata negara.

Mahkamah Konstitusi memainkan peran yang sangat penting dalam sistem hukum tata negara Indonesia, bertindak sebagai pengawas yang menjaga kesesuaian antara undang-undang yang berlaku dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi. Keberadaan MK merupakan langkah strategis untuk memperkuat demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

#### **B. Tujuan Utama Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Konteks Hukum Tata Negara**

1. Menjaga Kedaulatan Konstitusi: MK bertujuan untuk memastikan bahwa semua undang-undang dan kebijakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini penting untuk menjaga integritas konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara.
2. Melindungi Hak Asasi Manusia: Salah satu tujuan utama MK adalah melindungi hak-hak konstitusional warga negara. MK berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.
3. Menyelesaikan Sengketa Pemilu: MK memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan. Tujuan ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu.

4. Menegakkan Prinsip Pemisahan Kekuasaan: MK berperan dalam menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan mengawasi tindakan legislatif dan eksekutif, MK membantu menegakkan prinsip pemisahan kekuasaan yang merupakan dasar sistem pemerintahan demokratis.
5. Meningkatkan Kepastian Hukum: Dengan memberikan putusan yang jelas dan tegas mengenai undang-undang dan peraturan, MK berkontribusi pada penciptaan kepastian hukum. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diprediksi bagi masyarakat.
6. Mendorong Partisipasi Masyarakat: MK juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Melalui keputusan-keputusan yang adil, MK dapat mendorong warga negara untuk lebih aktif dalam menjaga dan menegakkan hak-hak konstitusional mereka.
7. Menjadi Rujukan Hukum: MK berfungsi sebagai lembaga rujukan dalam penegakan hukum tata negara, di mana putusan-putusan yang diambil menjadi acuan bagi pengembangan hukum dan praktik hukum di Indonesia.

Dengan tujuan-tujuan ini, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga dan menegakkan hukum tata negara, serta memperkuat demokrasi di Indonesia. Keberadaan MK membantu menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan. (Anon 2003)

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

- Kualitatif: Penelitian ini lebih fokus pada analisis mendalam tentang peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum tata negara. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konteks, makna, dan implikasi dari putusan-putusan MK.

### **2. Jenis Penelitian**

- Deskriptif: Penelitian ini bertujuan bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya dalam penegakan hukum, termasuk pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa pemilu, dan perlindungan hak konstitusional.

### **3. Sumber Data**

- Data Primer:
  - Wawancara dengan narasumber, seperti hakim Mahkamah Konstitusi, praktisi hukum, akademisi, dan aktivis hak asasi manusia.
  - Observasi langsung terhadap sidang-sidang Mahkamah Konstitusi (jika memungkinkan) untuk mendapatkan wawasan tentang proses dan dinamika di dalamnya.
- Data Sekunder:
  - Dokumen resmi, seperti putusan Mahkamah Konstitusi, laporan tahunan, dan publikasi terkait.
  - Buku, artikel ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

- Wawancara Mendalam: Menggali pandangan dan pengalaman narasumber terkait peran MK dalam penegakan hukum.
- Studi Dokumen: Menganalisis putusan-putusan MK yang relevan dan dokumen hukum lainnya untuk memahami bagaimana MK menjalankan fungsinya.
- Observasi: Jika memungkinkan, mengamati proses sidang MK untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang dinamika dan praktik di dalam lembaga.

### **5. Analisis Data**

- Analisis Kualitatif: Menggunakan teknik analisis isi untuk mengekstraksi tema dan pola dari wawancara dan dokumen. Data akan dianalisis untuk menemukan makna dan implikasi dari peran MK dalam penegakan hukum tata negara.
- Triangulasi Data: Menggunakan berbagai sumber data untuk memastikan validitas dan reliabilitas informasi yang diperoleh.

#### 6. Kesimpulan dan Rekomendasi

- Berdasarkan hasil analisis, peneliti akan menyusun kesimpulan mengenai peran MK dalam penegakan hukum tata negara dan memberikan rekomendasi untuk penguatan lembaga dan praktik hukum di Indonesia.

Metode penelitian ini dibuat untuk menyuguhkan pemahaman/penjelasan yang lebih komprehensif mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukum tata negara. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti bagi pengembangan hukum dan praktik di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Fungsi dan Tugas Mahkamah Konstitusi

MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Ini penting untuk memastikan bahwa semua regulasi sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. (Anon 2003)

1. Definisi Pengujian Undang-Undang: Uji materi adalah proses dimana Mahkamah Konstitusi (MK) menilai apakah suatu undang-undang telah sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Proses ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa undang-undang yang disahkan oleh Kongres konsisten dengan Konstitusi dan hak konstitusional masyarakat.
2. Dasar Hukum  
Pengujian undang-undang diatur dalam:
  - a) Pasal 24B UUD 1945: Menyatakan bahwa MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD.
  - b) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: Mengatur prosedur dan mekanisme pengujian undang-undang.
3. Prosedur Pengujian Undang-Undang
  - a) Pengajuan Permohonan: Pengujian undang-undang dapat diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan, seperti individu, kelompok, atau lembaga negara, yang merasa dirugikan oleh undang-undang tertentu.
  - b) Pemeriksaan Berkas: MK akan memeriksa berkas permohonan dan menentukan apakah permohonan tersebut memenuhi syarat untuk diproses.
  - c) Sidang Persidangan: MK akan mengadakan sidang untuk mendengarkan argumen dari pemohon, pihak terkait, serta pihak yang mewakili pemerintah.
  - d) Putusan: Setelah mempertimbangkan semua argumen dan bukti, MK akan mengeluarkan putusan yang menyatakan apakah undang-undang tersebut bertentangan atau tidak dengan UUD 1945.
4. Jenis-jenis Pengujian
  - a) Uji Materiil: Pengujian terhadap isi undang-undang untuk menentukan kesesuaian dengan UUD.
  - b) Uji Formal: Pengujian terhadap prosedur pembuatan undang-undang, untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Dampak Keputusan MK
  - a) Pembatalan Undang-Undang: Jika MK menyatakan bahwa undang-undang bertentangan dengan UUD, undang-undang tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku.

- b) Perbaikan Undang-Undang: Dalam beberapa kasus, MK dapat merekomendasikan perbaikan atau perubahan terhadap undang-undang yang diuji.
- c) Penguatan Hukum: Keputusan MK dalam pengujian undang-undang membantu menciptakan kepastian hukum dan keadilan, serta memperkuat prinsip demokrasi.

Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan mekanisme penting dalam menjaga kedaulatan konstitusi dan melindungi hak konstitusional rakyat. Melalui proses ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawas terhadap dokumen peraturan perundang-undangan, memastikan bahwa seluruh PERPU yang berlaku sejalan dengan prinsip demokrasi dan keadilan yang terkandung dalam UUD 1945.

## **B. Penyelesaian Sengketa Pemilu**

MK menyelesaikan sengketa hasil pemilu untuk menjaga keadilan dan integritas proses demokrasi.

1. Definisi Sengketa Pemilu: Sengketa pemilu merujuk pada perbedaan pendapat atau perselisihan yang muncul terkait pelaksanaan pemilihan umum, termasuk hasil pemungutan suara, penghitungan suara, dan berbagai aspek lain yang mempengaruhi integritas dan keadilan proses pemilu.
2. Dasar Hukum  
Penyelesaian sengketa pemilu diatur dalam:
  - a) Pasal 24B UUD 1945: MK memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum.
  - b) UU Nomor 24 Tahun 2003: Mengatur tentang MK dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu.
  - c) UU Pemilu: Setiap pemilu memiliki undang-undang spesifik yang mengatur prosedur dan ketentuan penyelesaian sengketa.
3. Prosedur Penyelesaian Sengketa Pemilu
  - a) Pengajuan Permohonan: Pihak yang merasa dirugikan, seperti calon legislatif, partai politik, atau pihak lain yang berkepentingan, dapat mengajukan permohonan ke MK.
  - b) Pemeriksaan Berkas: MK akan memeriksa apakah permohonan memenuhi syarat untuk diproses.
  - c) Sidang Persidangan: MK akan mengadakan sidang terbuka untuk mendengarkan argumen dari pihak pemohon, termohon (KPU atau pihak terkait), dan saksi jika diperlukan.
  - d) Putusan: MK akan mengeluarkan putusan yang mengesahkan atau membatalkan hasil pemilu berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan.
4. Jenis Sengketa Pemilu
  - a) Sengketa Hasil Pemilu: Perselisihan mengenai hasil pemungutan suara dan penghitungan suara.
  - b) Sengketa Proses Pemilu: Perselisihan terkait pelaksanaan pemilu, seperti pelanggaran aturan pemilu, praktik kampanye, dan penggunaan fasilitas negara.
5. Dampak Keputusan MK
  - a) Perubahan Hasil Pemilu: MK dapat memutuskan untuk mengubah hasil pemilu jika ditemukan bukti pelanggaran atau kesalahan signifikan dalam penghitungan suara.
  - b) Peningkatan Transparansi: Proses ini meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu.

- c) Penguatan Demokrasi: Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan transparan mendukung prinsip-prinsip demokrasi, memastikan bahwa suara rakyat dihargai dan diakui.

Penyelesaian sengketa pemilu oleh MK adalah aspek vital dalam menjaga keadilan dan integritas proses demokrasi di Indonesia. Dengan memberikan mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan perselisihan, MK berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa pemilu dilaksanakan dengan transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi hasil pemilu, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

### **C. Melindungi Hak Konstitusional**

MK juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan hak konstitusi warga negara.

1. Definisi Hak Konstitusional: Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi suatu negara, dalam hal ini oleh UUD 1945. Hak-hak ini mencakup hak asasi manusia, hak politik, dan hak sipil yang harus dilindungi oleh negara.
2. Dasar Hukum Perlindungan Hak Konstitusional  
Perlindungan hak konstitusional diatur dalam:
  - a) Pasal\_28A hingga 28J UUD 1945: Mengatur hak asasi manusia yang meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak untuk berpendapat, dan lain-lain.
  - b) Pasal\_24B UUD 1945: Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara.
3. Proses Perlindungan Hak Konstitusional
  - a) Pengajuan Permohonan: Warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dapat mengajukan permohonan ke MK untuk mendapatkan perlindungan.
  - b) Pemeriksaan Berkas: MK akan memeriksa kelayakan permohonan dan menentukan apakah akan melanjutkan proses.
  - c) Sidang Persidangan: MK akan mengadakan sidang untuk mendengarkan argumen dari pemohon, termohon (pihak yang dianggap melanggar hak), dan saksi jika diperlukan.
  - d) Putusan: MK akan memberikan putusan yang dapat berupa pengakuan hak, pengakuan pelanggaran, atau rekomendasi perbaikan.
4. Jenis Pelanggaran Hak Konstitusional
  - a) Pelanggaran oleh Negara: Tindakan pemerintah atau lembaga negara yang melanggar hak-hak individu, seperti penahanan sewenang-wenang atau pelanggaran kebebasan berpendapat.
  - b) Pelanggaran oleh Perorangan atau Lembaga Swasta: Ketika individu atau lembaga swasta melanggar hak orang lain, MK dapat berperan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul.
5. Dampak Keputusan MK dalam Perlindungan Hak Konstitusional
  - a) Restorasi Hak: Keputusan MK dapat memulihkan hak-hak yang telah dilanggar, memberikan keadilan bagi korban pelanggaran.
  - b) Penguatan Kesadaran Hukum: Melalui putusan-putusan MK, masyarakat menjadi lebih sadar akan hak-hak konstitusional mereka dan pentingnya melindunginya.
  - c) Pengembangan Hukum: Putusan MK berkontribusi pada pengembangan hukum dan kebijakan yang lebih baik dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia.

Melindungi hak konstitusional merupakan salah satu fungsi penting MK dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan menjamin keadilan, MK berperan dalam melahirkan masyarakat yang

adil, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia. Keberadaan MK sebagai lembaga peradilan konstitusi menjadi jaminan bahwa hak-hak konstitusional warga negara akan diakui dan dilindungi secara efektif.

## **SIMPULAN**

Fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penegakan hukum di Indonesia sangat krusial dan multifaset. Sebagai penjaga konstitusi, MK memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua undang-undang dan kebijakan publik sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pengujian undang-undang, MK mampu mengoreksi dan membatalkan regulasi yang tidak sesuai, sehingga menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Penyelesaian sengketa pemilu oleh MK juga berkontribusi signifikan terhadap legitimasi demokrasi, memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Selain itu, MK berperan dalam melindungi hak konstitusional warga negara dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Namun, MK juga menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan politik dan keterbatasan sumber daya, yang dapat mempengaruhi independensi dan efektivitasnya. Oleh sebab itu, diperlukan support dari semua pihak untuk memperkuat fungsi MK dalam penegakan hukum dan menjaga integritas sistem demokrasi di Indonesia. Secara keseluruhan, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan, tetapi juga sebagai pendorong bagi pengembangan hukum dan praktik demokrasi yang lebih baik, sehingga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil dan berkeadilan.

## **DAFTAR BACAAN**

- Budi, Sudarto. "Mahkamah Konstitusi: Antara Harapan dan Realitas". *Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 47-60.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Kuswan Hadji, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Tata Negara, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol.3 No.4 Tahun 2024
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. "Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi". Jakarta: MPR RI, 2020.
- Mardani, Muhammad. *Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Riyanto, Rahmat. "Pengujian Undang-Undang dan Perlindungan Hak Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012): 78-99.
- Sihombing, Elvin. *Peradilan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Suharso, M. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu". *Jurnal Administrasi Publik* 15, no. 3 (2016): 256-273.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara, 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Negara, 2003.